



STIMA



Tahun XV Nomor 3 September 2009

Jurnal Manajemen

Mediastima

Jurnal Ilmiah STIMA KOSGORO

ISSN 0852-7105

Memaksimalkan Pendapatan Penerimaan Setoran Pajak Melalui Sistem MP3

Irma Setiawati

Pengaruh Biaya Usaha dan Volume Usaha Terhadap Efisiensi Finansial Pada Kopkar di Kota Batam

Makhdalena

Pengembangan Tenaga Fungsional Auditor Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Jenjang Karir Pada Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2007

*Danial Thaib
Sutraso*

Strategi Pengelolaan Keuangan Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing

*Sugeng Suroso
Soenaryo*

Kriteria SDM Dalam Menangani Biro Perjalanan Haji dan Umroh Pada PT. Tripuri Travel Jakarta

Delila Rambe

Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Pada Perusahaan Automotive and Allied Product di BEI)

Nur Azlina

Pengembangan Sumberdaya Manusia Berbasis Kompetensi

Dodi Wahab

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal

Prisila Damayanty

SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN KOSGORO
JAKARTA

Jurnal
Manajemen
STIMA Kosgoro

ISSN 0852-7105

Pimpinan Umum:

Dr. Ir. Jayadi Kamrasyid,
MSP, MES, MBA
(Ketua STIMA KOSGORO)

Pimpinan Redaksi:

Drs. H. Daniah Thail, MM

Dewan Redaksi:

Prof. Dr. Tamburaka
Prof. Dr. Anwar Arifin
Dr. Asri Noer
Dr. Harry Azhar Azis, MA
Dr. Bustanul Arifin
Dr. Irma Alamsyah
Dr. Aswan Yunas, M.Si, MM
It. H. Dodi Wahab, MM
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc
Syamsul Bachri, M.Sc
Ir. Andri Nur, M.Sc, MM
Dra. Irma Setyawati, MM
Drs. H. Basar Hassan, MM
Enny Widayati, S.Mi, MM
Drs. Anton Nangoy, MBA

Sirkulasi:

M. Yuni Asri, Pentti, Aminah

Alamat Redaksi:

STIMA KOSGORO
Komplek Bumi Harapan
Permai
Jalan Bumi Pratama Raya
Kramat Jati-Jakarta Timur
13550

Telepon (021)87781945

Fax (021)87781948

stima@dnatnol.id

Pelaksana Produksi:
Mediastima Press

Terbit Pertama Kali
Januari 1995

DARI MEJA REDAKSI

Salam Istimewa untuk pembaca sekalian!!

Selama 14 tahun atau 52 edisi, Jurnal STIMA Kosgoro sudah diterbitkan. Sejumlah tulisan yang bersumber dari penelitian dan telaah pustaka dari para pakar dan ahli manajemen telah dipublikasikan. Harapan untuk lebih baik dikemudian hari, berbagai kelemahan dan kekurangan selama penerbitan sudah dievaluasi. Semoga penerbitan yang akan datang menjadi lebih baik.

Untuk dapat berbuat lebih banyak dan lebih fokus pada kajian manajemen, maka sesuai dengan rapat pimpinan STIMA Kosgoro, mulai edisi tahun XV nomor 3 September 2009, **MEDIASTIMA Kosgoro** namanya menjadi **Jurnal Manajemen STIMA Kosgoro**. Semoga pergantian nama ini lebih meningkatkan mutu tulisan yang diterbitkan.

Terbitnya jurnal ini, tak terlepas dari kontribusi semua pihak, mulai dari jajaran pimpinan STIMA Kosgoro, organisasi Kosgoro dan Kontributor tulisan. Tanpa bantuan dari berbagai pihak tersebut mustahil jurnal Manajemen ini akan eksis. Sebagai apresiasi untuk bantuan tersebut, maka pimpinan redaksi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga bantuan dan disertai dengan kerja keras pengurus (dewan redaksi) dapat membuat Jurnal Manajemen STIMA Kosgoro menjadi jaya.

Edisi pertama setelah berganti nama ini, Jurnal Manajemen STIMA Kosgoro menghadirkan delapan buah tulisan. Enam tulisan dari dosen STIMA Kosgoro dan dua tulisan dari dosen Universitas Riau. Harapan kami semoga pada edisi yang akan datang lebih banyak kontribusi tulisan dari berbagai pakar di seluruh tanah air.

Akhirnya redaksi yakin, Kita semua dapat membesarkan media ini. Karena tanpa dukungan berbagai pihak, sulit bagi Jurnal Manajemen STIMA Kosgoro untuk membesarkan diri. Terima kasih atas partisipasi dan atensi semua pihak yang telah ikut membesarkan Mediastima.

Redaksi

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
Susunan Redaksi	<i>i</i>
Dari Meja Redaksi	<i>i</i>
Daftar Isi	<i>ii</i>
Memaksimalkan Pendapatan Penerimaan Setoran Pajak Melalui Sistem MP3.....	1
<i>Irma Setiawati</i>	
Pengaruh Biaya Usaha dan Volume Usaha Terhadap Efisiensi Finansial Pada Kopkar di Kota Batam.....	8
<i>Makhdalena</i>	
Pengembangan Tenaga Fungsional Auditor Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Jenjang Karir Pada Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2007	13
<i>Danial Thaib</i>	
<i>Sutraso</i>	
Strategi Pengelolaan Keuangan Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing.....	24
<i>Sugeng Suroso</i>	
<i>Soenaryo</i>	
Kriteria SDM Dalam Menangani Biro Perjalanan Haji dan Umroh Pada PT. Tripuri Travel Jakarta.....	33
<i>Delila Rambe</i>	
Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan <i>Automotive and Allied Product</i> di BEI).....	39
<i>Nur Azlina</i>	
Pengembangan Sumberdaya Manusia Berbasis Kompetensi	50
<i>Dodi Wahab</i>	
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal	57
<i>Prisila Damayanty</i>	
Contoh Penulisan Artikel Ilmiah	64
Kriteria Naskah Yang Dimuat J. <i>Manajemen</i> STIMA Kosgoro.....	65

Memaksimalkan Pendapatan Penerimaan Setoran Pajak Melalui Sistem MP3

Irma Setiawati*

Abstrak

This paper discusses the scientific process of tax revenues to the MP3 system (Payment Monitoring Reporting Number). MP3 is a program of cooperation between the Directorate General of Taxation with the Bank of Perception. MP3 is a breakthrough program - a breakthrough for the Directorate General of Taxes target revenues from the state sector tax. Therefore, the necessary planning in deposit tax revenues not only from the product - product konvensional only. Perceptions of the Bank, in cooperation with Directorate General of Taxes in the case of the receipt of deposit fee is a tax-based income in banks outside income from loans given to customers.

MP3 system with the government have the opportunity to maximize tax revenues deposit. In addition, the tax can be served quickly and can monitor by Director General of Tax, so that reduce the risk of making fictitious SPT.

Pendahuluan

Pembangunan yang kini sedang berlangsung sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak. Dukungan keuangan atau pendanaan dalam membiayai pembangunan sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan negara. Peranan pajak sebagai sumber utama penerimaan kas negara semakin penting dirasakan, karena dalam Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN), pajak merupakan pos penerimaan negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Pajak merupakan beban bagi masyarakat karena mengurangi pendapatan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak belum optimal. Selain pajak masih dianggap beban, masyarakat juga belum benar-benar merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkannya. Di sisi lain, pemerintah setiap tahun menaikkan penerimaan pajak dalam RAPBN, sehingga pemerintah selalu mencari kegiatan yang dapat dijadikan sebagai obyek pajak.

Oleh karena adanya keinginan yang bertolak belakang dari masyarakat sebagai pihak yang harus membayar pajak dengan pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak, maka pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan untuk menarik minat para wajib pajak untuk sadar akan pentingnya membayar pajak. Salah satunya adalah program khusus untuk mempermudah wajib pajak membayarkan pajaknya melalui program MP3 Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3).

Program MP3 merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dengan Bank Persepsi di mana melalui sistem ini dapat mempercepat dan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak dan dapat juga meminimalisasi SPT Fiktif.

Program MP3 merupakan terobosan – terobosan Dirjen Pajak untuk pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu diperlukan perencanaan dalam penerimaan setoran pajak tidak hanya dari produk – produk konvensional saja. Bagi Bank

* Dosen STIMA KOSGORO Jakarta

Persepsi, kerjasama dengan Dirjen Pajak dalam hal penerimaan setoran pajak merupakan *fee based income* bank di luar pendapatan dari kredit yang diberikan kepada nasabahnya.

Mekanisme penerimaan pajak dengan sistem MP3 perlu disebarluaskan kepada wajib pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan setoran pajak.

Pembahasan

Menurut Mardiasmo (2002,6) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

Perlawanan pasif terhadap pajak merupakan perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*), Melalaikan Pajak.

Dalam rangka meminimalkan penghindaran pajak atau perlawanan pajak, maka berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bank diperbolehkan menerima setoran negara bukan dalam rangka impor yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bank persepsi. Sedangkan bank devisa persepsi adalah bank devisa yang menerima setoran penerimaan negara dalam rangka import. Kantor yang ditunjuk pemerintah untuk penerimaan setoran pajak dari bank – bank persepsi yang disebut Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN).

Penerimaan pelayanan setoran pajak sistem MP3 pada suatu bank dalam melayani setoran pajak di luar cabang Bank Persepsi dapat diselesaikan dengan cepat dan nyaman, baik bagi para nasabah bank dan juga non nasabah. Di sisi lain dapat mengurangi beban Bank Persepsi. Dalam penerimaan setoran pajak dengan menggunakan sistem MP3, pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut :

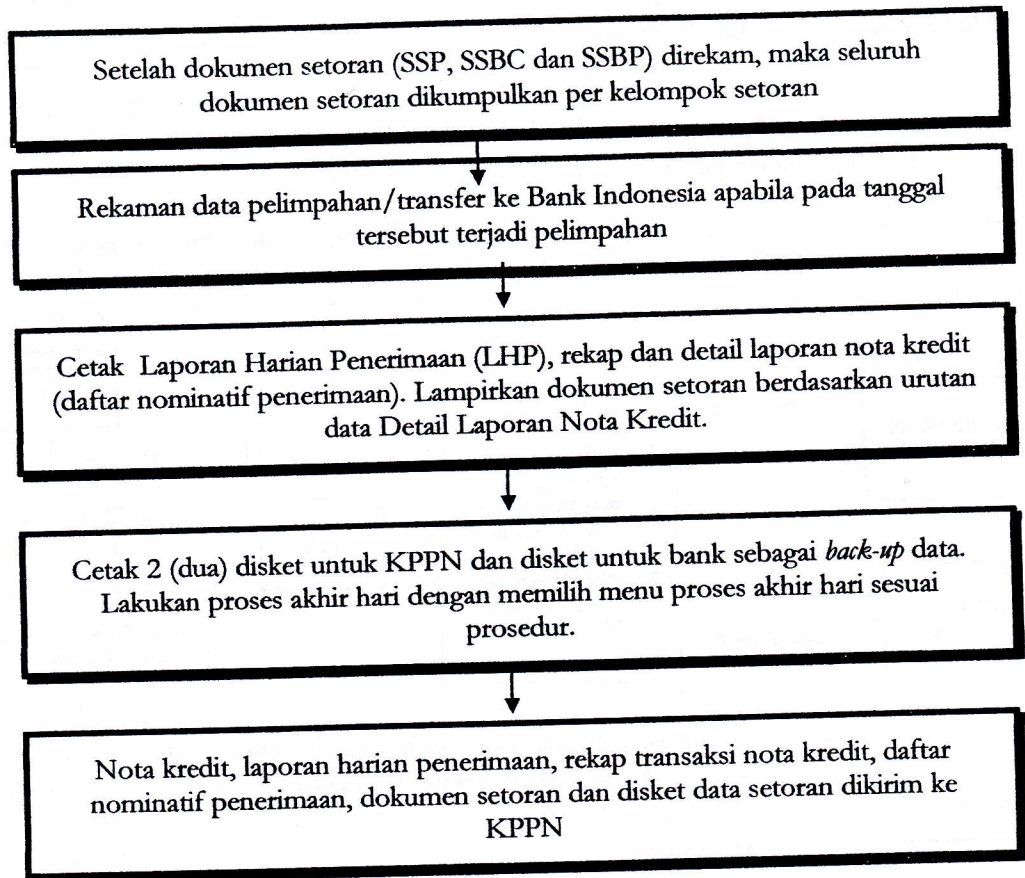
1. *Service Assistant* (SA),
2. *Teller/RCA*,
3. *Back office*

Adapun proses penerimaan setoran pajak dengan menggunakan sistem MP3 pada bank-bank adalah:

1. *Service Assistant* (SA)
 - a. Menerima setoran dari nasabah berupa Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) rangkap empat

- b. Memeriksa kelengkapan pengisian, dengan memperhatikan : Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kode Mata Anggaran Penerimaan, nominal dan terbilang. Untuk nominal dan terbilang, pengisian desimal tidak dibenarkan.
 - c. Apabila pengisian telah diyakini kebenarannya, SSP beserta Surat Perintah Pembayaran/tunai dapat langsung diserahkan ke *Teller/CRA/Back Office* untuk dibukukan ke Rekening Kas Negara Persepsi.
 2. *Teller/RCA.*
 - a. Menerima setoran dari nasabah berupa SSP, SSBC, SSBP rangkap 5 (lima)
 - b. Memeriksa kelengkapan pengisian, dengan memperhatikan : Nama Wajib Pajak, NPWP, Kode Mata Anggaran Penerimaan, nominal dan terbilang. Untuk nominal dan terbilang, pengisian desimal tidak dibenarkan.
 - c. Apabila pengisian telah diyakini kebenarannya, SSP berikut Surat Perintah Pembayaran / tunai dengan fungsi dikredit ke Rekening Kas Negara Persepsi.
 - d. Untuk selanjutnya SSP beserta tiket dikirim ke *Back Office* untuk di proses.
 3. *Back Office*
 - a. Penerimaan pembayaran pajak
 - Menerima instruksi pembayaran pajak/SSP dari wajib pajak/SA
 - Memeriksa pengisian data pajak
 - Dengan fungsi komputer yang bersesuaian melakukan transaksi pembayaran pajak
 - Memeriksa kebenaran data hasil validasi system MP3 dengan instruksi wajib pajak
 - Bila transaksi berhasil, maka jurnal akan didebet atas kas/ giro/ tabungan/ MMU dan dikredit atas giro penampungan pajak
 - b. Pencetakan NTTP (Nomor Transaksi Pembayaran Pajak)
 - Dengan menggunakan fungsi komputer yang bersesuaian melakukan pencetakan NTTP pada kolom yang tersedia di SSP
 - Mendistribusikan lembar SSP sesuai ketentuan
 - c. Pelaporan ke Dirjen Anggaran bagi cabang Bank Persepsi
 - Menginput data SSP pada program Sistem Penerimaan Negara
 - Mencetak Laporan Penerimaan Harian dan membandingkan dengan data SSP
 - Mem-*back up* ke disket data hasil posting pada aplikasi Sistem Penerimaan Negara
 - Mengirim disket hasil *back up* penerimaan SSP dan *hard copy*-nya ke Dirjen Anggaran.

Proses akhir hari adalah menu yang harus dijalankan pada saat penutupan proses. Adapun langkah-langkahnya seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Langkah-langkah Proses Penerimaan Setoran Pajak

Istilah-istilah penerimaan setoran pajak :

Rekening Kas Negara Persepsi :

Rekening kas negara pada bank persepsi yang digunakan untuk menampung setoran penerimaan negara, perjenis pajak/penerimaan dengan kode sesuai dengan yang di tetapkan.

Rekening Gabungan Kas Negara:

Rekening kas negara pada bank persepsi/bank devisa persepsi yang digunakan untuk menampung pelimpahan jumlah setoran pajak jumlah setoran penerimaan negara pada hari itu juga dari rekening kas negara persepsi.

Nota Kredit:

Nota pemberitahuan dari bank persepsi/bank devisa persepsi bahwa rekening kas negara pada bank yang bersangkutan telah dikredit sebesar nota tersebut.

Nota Debet:

Nota pemberitahuan dari bank persepsi atau bank devisa persepsi bahwa rekening kas negara pada bank bersangkutan telah didebet sesuai dengan nota tersebut.

Laporan Harian Penerimaan:

Berisi jumlah penerimaan berkelompok penerimaan, jumlah pelimpahan dan jumlah saldo yang dilimpahkan.

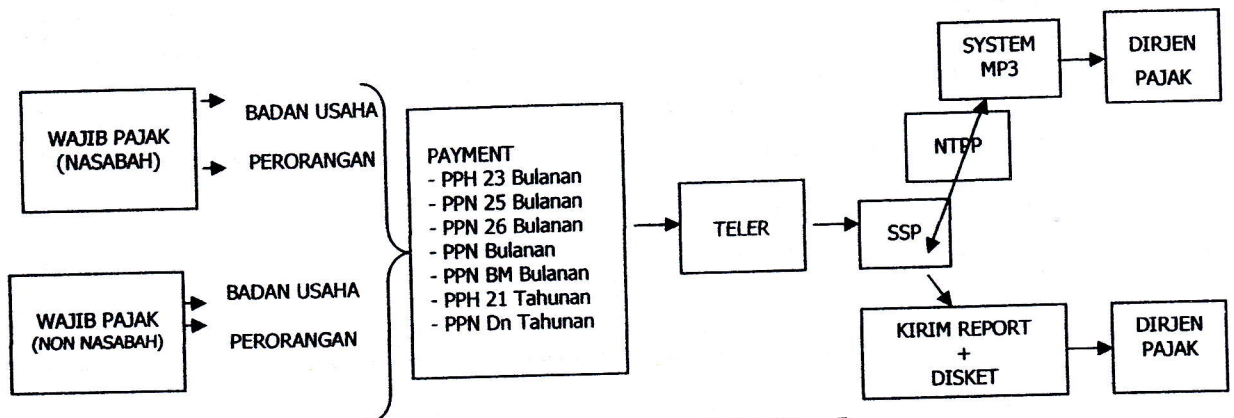
Rekap Transaksi per Nota Kredit:

Berisi nota kredit pada tanggal tersebut.

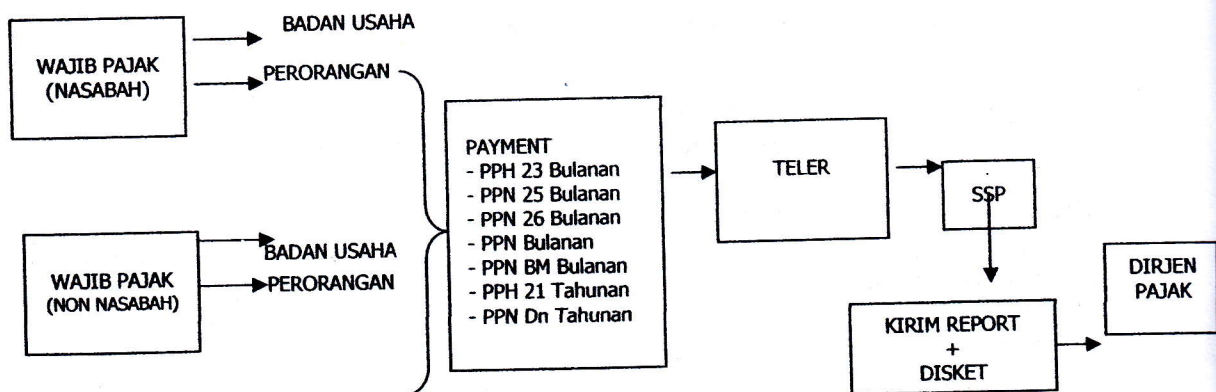
Daftar Nominatif penerimaan:

Berisi perincian penerimaan per wajib pajak/penyetor.

Perbedaan skema pembayaran pajak non impor melalui Bank Persepsi sebelum dan sesudah sistem MP3, dapat dilihat pada gambar 2 dan 3 berikut.



Gambar 2. Skema Pembayaran Pajak Non Impor Melalui Bank Persepsi Sistem MP3



Gambar 3. Skema Pembayaran Pajak Non Impor Melalui Bank Persepsi Sebelum Sistem MP3

Keterangan :

- Sebelum sistem MP3 setelah pembayaran melalui Teler langsung ke SSP, kemudian dari SSP dikirim *report* dan disket ke Dirjen Pajak.
- Sesudah sistem MP3 selain sama dengan sebelum sistem MP3 ada tambahan setelah pembayaran dari teler lalu ke NTTP sistem MP3, baru ke Dirjen Pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan sistem MP3 pemerintah mempunyai kesempatan untuk memaksimalkan pendapatan penerimaan setoran pajak.
2. Pelayanan pajak dapat dilayani dengan cepat dan dapat termonitor oleh Dirjen Pajak, sehingga mengurangi resiko pembuatan SPT fiktif.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk lebih baiknya dalam proses penerimaan setoran pajak adalah:

1. Proses pemeriksaan *Control Unit* perlu ditingkatkan untuk menghindari/meminimalisasi kesalahan dalam proses setoran pajak.
2. Dengan adanya fasilitas ATM, NPA, NGA dan fasilitas phone banking 14041 di Bank kiranya fasilitas ini dapat segera direalisasikan di masa mendatang untuk layanan setoran pajak sistem MP3 sehingga lebih memudahkan wajib pajak.

Daftar Pustaka

Kesit Bambang Prakosa, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta

Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta

Mulyono, Djoko, 2008, *Ketentuan Umum Perpajakan*, Andi, Yogyakarta

Nurmantu, Safri, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Edisi Dua, Granit, Jakarta

Waluyo dan Wirawan B Ilyas, 2002, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kesatu, Salemba Empat, Jakarta.